

Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal

Regina Singestecia¹, Eko Handoyo¹, Noorocmat Isdaryanto¹

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2017
 Accepted Nov 26th, 2017
 Published Jan 15th, 2018

Keyword:

Political Participation;
Chinese Community; Local-Head Election

Abstract

As a country that adopts democracy, Indonesia conducts general elections to choose their leaders. General elections of regional heads and deputy regional head held every five years. The political participation of the citizens is needed for the success of the democratic party. Just as the Chinese community, their participation is also needed because of their status as the citizens of Indonesia. This study was conducted to answer the question of how the political participation of the community and what are the factors affecting the Chinese community's political participation in the general elections of regional head and deputy regional head in 2014 at Slawi Wetan Village. This research was conducted in the Slawi Wetan Village, Tegal Regency. The method used in this research was descriptive qualitative. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used in this study was the technique of interactive analysis which carried out in several steps of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that there were 142 Chinese people who were registered in the voters list in the general elections of regional head and deputy regional head 2014 in Slawi Wetan village. The level of political participation of the Chinese community in Slawi Wetan Village in the general election of regional head and deputy head of the region in 2014 occupied the Delegate Power. The Chinese community's political participation can be shown from the various forms of political participation that consists of informal political discussion and voting. In the implementation, there were factors that affect the Chinese community in the political participation.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Singestecia, R. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 63-72. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21670>
 More Citation Formats

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah hal yang mempengaruhi sistem politik sebuah negara yang demokratis, karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa adanya

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: reginasinges06@gmail.com

partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, Miriam 2008:367). Partisipasi politik mempunyai hubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka.

Leluhur orang Tionghoa-Indonesia bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Catatan-catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara dan sebaliknya. Setelah negara Indonesia merdeka, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomer 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kini tidak ada lagi sekat dalam kehidupan politik ketika gelombang demokrasi menyerbu tanah air Indonesia. Apalagi semenjak Indonesia meratifikasi undang-undang diskriminasi ras dan etnik. Seharusnya etnis Tionghoa terlepas dari anggapan miring keterlibatannya dalam dunia politik dapat mengambil kesempatan tersebut. Tetapi setidaknya ada kondisi-kondisi yang dapat mendorong etnis Tionghoa untuk meningkatkan partisipasi politiknya dalam arus demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2004, tercatat meskipun sedikit beberapa calon legislatif dari etnis Tionghoa yang berhasil duduk di kursi DPR-DPRD, perkembangan selanjutnya dapat ditemukan partisipasi etnis ini dalam tataran politik praktis eksekutif daerah. Kemunculan Ahok yang menjadi wakil Jokowi sewaktu menjabat gubernur DKI Jakarta, terutama dapat dijadikan suatu kondisi yang mendukung bagi peningkatan partisipasi politik etnis Tionghoa.

Partisipasi politik etnis Tionghoa adalah warna tersendiri dalam demokrasi Indonesia. Jika kondisi politik dan sistem demokrasi di Indonesia berhasil merangkul juga meningkatkan partisipasi politik etnis Tionghoa. Hal ini merupakan pendidikan politik yang paling berharga. Dalam tataran demokrasi Indonesia, untuk kasus pada etnis Tionghoa, bagaimana demokrasi yang berjalan mengakomodir minoritas ini yang belum tampak. Disisi lain pendidikan politik lainnya yang dapat dipetik dari keberadaan suara

minoritas, adalah bagaimana nantinya cara sebuah sistem politik memperlakukan suara minoritas pada tataran atasnya., dan dibawah bagaimana minoritas dihadapkan pada kepentingan-kepentingannya yang tidak sebatas pada pemenuhan ekonomi, tetapi hak-hanya juga sebagai manusia berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat diperjuangkan hingga pada tingkat sistem yang tertinggi yang mampu menaungi mereka dan menjamin mereka secara konstitusional lewat jalur politik.

Tegal merupakan kabupaten yang terletak pesisir utara pulau Jawa. Wilayah Tegal merupakan lembah Gunung Slamet yang berbatasan dengan daerah Brebes dan Pemalang di sebelah barat dan timur, serta Banyumas di sebelah Selatan. Masyarakat yang mendiami daerah Tegal diantaranya adalah masyarakat pribumi asli yang merupakan penduduk asli Tegal, ada etnis Tionghoa yang kebanyakan tinggal di daerah pecinan. Etnis Tionghoa pada masa ini sudah mampu mendirikan sekolah sendiri. Sekolah T.H.H.K merupakan kepanjangan dari Tion Hoa Hwee Kwan atau Rumah Perkumpulan Tionghoa, THHK adalah sebuah organisasi yang didirikan tanggal 17 maret 1900 oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Batavia. Tujuan utama para pendirinya adalah untuk mendorong orang Tionghoa yang bermukim di Indonesia untuk mengenal identitasnya. Kegiatan utama THHK antar lain membangun dan membina sekolah berbahasa Mandarin.

Seperti halnya di Slawi kabupaten Tegal, banyak masyarakatnya yang keturunan Tionghoa sehingga ada perbedaan partisipasi politik antara keturunan Tionghoa dengan masyarakat biasa. Mayoritas dari masyarakat Tionghoa di Slawi berada di sektor ekonomi dan masih sedikit yang merambah dunia politik. Dengan adanya perbedaan partisipasi politik di Slawi maka hal ini dapat diteliti dan dapat dicari faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga data-data yang diambil lebih akurat dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah 1) Untuk mengkaji partisipasi politik dalam pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat keturunan Tionghoa dalam pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal; 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat keturunan Tionghoa dalam pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya menambah ilmu tentang pelayanan publik. Secara praktis penelitian ini diharapkan 1) untuk dapat dijadikan acuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep partisipasi politik; 2) Bagi masyarakat Tionghoa, hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang partisipasi politik di Slawi Kab. Tegal; 3) Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi literatur bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai studi yang terkait dengan partisipasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2010:6) adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 1) Partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Slawi Kabupaten Tegal pada Pilkada tahun 2014 yang terdiri dari bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa; 2) Faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Tionghoa dalam berpartisipasi politik pada pilkada tahun 2014 yang terdiri dari motif-motif yang mendorong masyarakat Tionghoa dalam berpartisipasi politik dan antusiasme masyarakat Tionghoa dalam berpartisipasi politik. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Slawi Wetan Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, karena Kecamatan Slawi banyak masyarakat keturunan Tionghoa yang memiliki sejarah kurang berpartisipasi dalam politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber pengumpulan data, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data primer yang diperoleh berasal dari informan pada masyarakat keturunan Tionghoa yang memberikan suara pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Tegal tahun 2014. Teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer adalah peneliti mewawancarai dengan berbagai pertanyaan secara langsung kepada masyarakat keturunan Tionghoa dengan begitu data-data via wawancara akan dapat diperoleh. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2013:225). Dokumen adalah segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan masa lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian dan pencatatan dokumen antara lain dengan mengumpulkan data dari Kantor

Kelurahan Slawi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tegal serta kondisi aktual lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Tionghoa bersifat sukarela. Masyarakat Tionghoa melakukan pemilihan atas kesadarannya sendiri sebagai wujud warga Negara yang baik dan untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Budiardjo (2010: 367) yang menyebutkan bahwa partisipasi politik berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan dari orang lain (partisipasi yang dimobilisasi).

Bentuk partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi wetan adalah partisipasi politik konvensional. Sebagian masyarakat Tionghoa melakukan pemberian suara dengan cara menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara. Sebagian masyarakat Tionghoa juga aktif melakukan kegiatan diskusi politik yang bersifat informal melalui sosialisasi di gereja seputar perkembangan pelaksanaan Pilkada dengan orang lain di dalam berbagai kesempatan. Masyarakat Tionghoa aktif melakukan pemberian suara dengan cara menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini sesuai dengan pendapat Almond dalam Suryadi, (2007:133) yang menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik terdiri dari konvensional dan non konvensional. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensional termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif. Sedangkan bentuk-bentuk partisipasi politik non konvensional terdiri dari pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran), tindak kekerasan terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya dan revolusi.

Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (votting) entah untuk memilih para calon wakil rakyat, entah untuk memilih kepala Negara. Pendapat ini sesuai dengan hasil penelitian masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan yang memberikan suara dengan berbagai latar belakang alasan yang berbeda

antara seseorang dengan orang lain. Alasan tersebut antara lain karena atas kesadarannya sendiri sebagai warga Negara yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, mendapatkan hasil penelitian bahwa pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik aktif dan yang paling luas tersebar. Pemberian suara terdapat di hampir semua sistem politik baik demokratis maupun otoriter. Disisi lain pemberian suara dapat juga dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara tidak terlaksana. Selain itu pemberian suara tidak melihat adanya pembatasan-pembatasan lainnya, termasuk juga tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan.

Bentuk partisipasi politik lain yang di lakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan adalah diskusi politik informal. Bentuk diskusi politik yang di lakukan masyarakat Tionghoa berupa sosialisasi dan Tanya jawab politik dengan pihak terkait. Diskusi politik ini mereka lakukan pada saat sebelum pelaksanaan Pilkada. Diskusi politik informal dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti setelah melakukan ibadah di gereja. Hal ini sesuai pendapat Maran (2007:151) yang mengatakan bahwa diskusi politik informal termasuk dalam bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar, yang dilakukan entah dalam keluarga, entah ditempat kerja atau ditempat lain.

Bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat sebagai berikut:

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau administratif
3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi-politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. Partisipasi dalam pemungutan suara (votting)

Jika di analisis menurut bentuk partisipasi politik yang di kemukakan oleh Michael Rush & Althoff, maka perilaku masyarakat Tionghoa yaitu partisipasi dalam pemungutan suara dan partisipasi dalam diskusi politik. Tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa yaitu delegate power. Dimana kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan masyarakat Tionghoa yang

suaranya dibutuhkan oleh pemerintah dalam pemilihan umum. Kemenangan dalam pemilihan umum mutlak ditentukan oleh pilihan masyarakatnya.

Dari hasil penelitian maka masyarakat Tionghoa hanya menduduki beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu *delegate power*, dimana kewenangan masyarakat lebih tinggi daripada penyelenggara negara. Begitu juga masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan, suara masyarakat Tionghoa sama di anggap berpengaruh dalam terlaksananya pilkada tahun 2014 karena masyarakat Tionghoa juga termasuk warga negara yang sah dan mereka memiliki hak dan kewajiban sama dalam pilkada tahun 2014. Yang kedua yaitu *partnership*, dimana terjadinya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mengajak masyarakat Tionghoa untuk bersama-sama menyuarakan keinginan dan mengambil keputusan-keputusan bersama melalui sosialisasi informal yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan juga memiliki kemampuan serta hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga yaitu *consultation*, dimana pemerintah melakukan diskusi terkait agenda yang akan dilaksanakan dengan elemen masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah melakukan diskusi informal dengan masyarakat Tionghoa terkait visi dan misi dari calon bupati dan wakil bupati. Hal ini menghindari adanya diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Diskusi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dilaksanakan di Gereja St. Maria Slawi secara informal. Setelah melakukan ibadah maka masyarakat Tionghoa bebas bertanya dan memberikan kritik dan saran kepada pemerintah terkait pilkada di Slawi.

Berikut ini adalah faktor pendorong dan penghambat yang melatarbelakangi partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2014 yang terdiri dari Kesadaran Politik, berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Tionghoa sudah banyak yang memiliki perasaan bahwa menggunakan hak pilih merupakan sebuah kewajiban sebagai warga Negara. Hal ini mendorong mereka untuk ikut serta dalam serangkaian kegiatan Pilkada tahun 2014, khususnya dalam pemungutan suara. Karena partisipasi politik mereka sangat penting dan berpengaruh bagi kegiatan pemilihan umum tersebut. Pendidikan yang tinggi, pendidikan yang tinggi berbeda makna dengan pendidikan politik yang tinggi. Akan tetapi, tingkat pendidikan yang tinggi membawa pengaruh terhadap pendidikan politik yang juga tinggi. Biasanya orang yang memiliki pendidikan tinggi, akan memiliki sikap yang kritis dan keinginan tinggi untuk mempelajari politik. Mereka akan mencari tahu tentang politik untuk mengetahui isu-isu yang terjadi di dunia politik. Misalnya mencari tahu berita politik

yang ada di media elektronik maupun media massa. Seperti masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan yang sebagian besar juga memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mengetahui pengetahuan politik yang cukup melalui berita yang ada di televisi dan internet, masyarakat memiliki bekal pendidikan politik yang baik pada saat menempuh pendidikan formal karena sebagian masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan hanya lulusan SMA. Relevansi tingkat pendidikan dengan partisipasi politik terletak dalam salah satu fungsi pendidikan itu sendiri. Pendidikan berfungsi untuk memberikan atau membentuk tahap-tahap kecerdasan politik anggota-anggota masyarakat. Dengan ini diasumsikan, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka tingkat kesadaran politiknyapun semakin tinggi pula. Jadi dalam masyarakat yang mempunyai kesadaran politik tinggi yang disebabkan oleh tingginya kualitas pendidikan atau tersebarnya pendidikan di dalam masyarakat, maka partisipasi politik akan tinggi. Pengaruh Media Massa, pengaruh media massa terhadap partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan cukup besar. Masyarakat Tionghoa terdorong untuk ke TPS karena melihat tokoh politik yang di calonkan melalui media massa. Mereka berfikir ada calon yang di anggap baik sehingga mereka harus memilihnya dengan cara memberikan suaranya di Pilkada. Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan rata-rata memiliki tingkat pendidikan akhir setara SMA. Dengan berpendidikan yang cukup tinggi maka masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan memiliki kesadaran melek teknologi dan pola pikir yang kritis. Status Sosial Ekonomi, berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi pengaruh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan, mereka memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Dengan memiliki status sosial ekonomi tinggi maka masyarakat tionghoa beranggapan harus memilih pasangan bupati dan wakil bupati yang baik. Mereka beranggapan kalau mereka memilih maka mereka dapat memiliki kesejahteraan yang lebih baik lagi. Sumber daya yang mereka miliki dapat di kelola dan di dimanfaatkan secara lebih luas lagi. Kandidat yang mereka pilih juga yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan masyarakat Tionghoa tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: Partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2014 ditunjukkan dalam beberapa

bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu kegiatan diskusi politik informal dan pemberian suara. Dari beberapa bentuk partisipasi tersebut, pemberian suara merupakan bentuk partisipasi politik yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemberian suara di Kelurahan Slawi Wetan pada Pilkada tahun 2014 mencapai 95,58%. Dan tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan termasuk dalam *delegate power*, yaitu kewenangan masyarakat lebih tinggi dari penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan keikutsertaan masyarakat Tionghoa dalam pilkada langsung di kabupaten Tegal.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat Tionghoa pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2014 terdiri dari kesadaran politik yaitu masyarakat Tionghoa sudah banyak yang memiliki perasaan bahwa menggunakan hak pilih merupakan sebuah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua pengaruh media massa, masyarakat Tionghoa terdorong untuk ke TPS karena melihat tokoh politik yang di calonkan melalui media massa karena masyarakat Tionghoa sudah memiliki kesadaran melek teknologi. Pendidikan yang tinggi, orang yang memiliki pendidikan tinggi akan memiliki sikap yang kritis dan keinginan tinggi untuk mempelajari politik. Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Slawi Wetan yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mengetahui pengetahuan politik yang cukup melalui media massa. Status sosial ekonomi, dengan memiliki status sosial ekonomi yang tinggi maka masyarakat Tionghoa beranggapan harus memilih kepala daerah yang baik.

Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian tersebut diatas, maka peneliti memberikan saran kepada 1) Pemerintah Kelurahan Slawi Wetan hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya dalam kegiatan-kegiatan politik seperti mengadakan sosialisasi politik dan lebih memberikan pendidikan politik; 2) Masyarakat Tionghoa hendaknya lebih peka, membuka diri, dan lebih aktif lagi dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah seperti pemilu karena tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi politik. Karena partisipasi politik masyarakat sangat penting dan memberikan pengaruh bagi pelaksanaan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2010). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Choilisin, dkk. (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Firmanzah. (2007). *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Handoyo, Eko. (2008). *Sosiologi Politik*. Semarang: UNNES Press
- Huntington Samuel, Nelson J. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Maran, Rafael R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Meolong. J. Lexy. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko, Joko J. (2005). *Pilkada Secara Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rachman, Maman. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UNNES Press.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, Ramlan. (1997). *Partai, Pemilihan, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: KOMPAS GRAMEDIA.
- Suryadi, Budi. (2007). *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 2 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah